

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Komunikasi merupakan topik yang sangat menarik diperbincangkan, bukan saja dikalangan akademisi di masyarakat luas pun menjadi standar tersendiri dalam aktivitas sehari-hari, pasalnya komunikasi merupakan sebuah identitas yang berkaitan dengan penafsiran serta persepsi, sejarah telah mencatat bahwa tidak ada satu bangsa pun yang tidak mempunyai bahasa sebagai alat komunikasi yang efektif dalam prosesnya.¹

Setiap manusia yang lahir pasti mempunyai cara berkomunikasi dengan sebuah komunikasi yang sudah di ajarkan serta mampu menerima serta memberikan sebuah informasi atau pesan dengan apa yang dibutuhkan, eksistensi serta keberadaan komunikasi telah hadir sejak pertemuan antara Adam dan Hawa di alam semesta, karena perjumpaan itu eksistensinya tetap terawat samapi sekarang, samapai membentuk sebuah persahabatan, pertemanan, persekutuan atau perkawinan. justru orang banyak mengistilahkan komunikasi sebagai pererat hidup bersama serta merupakan aktivitas yang hadir bersama kehadiran serta peretemuan Adam dan Hawa.²

Oleh karenanya karena komunikasi merupakan suatu identitas dalam kehidupan manusia, maka semua interaksi manusia dengan lingkungannya akan terus berkaitan dalam hal apapun, karena komunikasi merupakan suatu alat manusia menjalin interaksi satu dengan yang lainnya dalam semua hal, termasuk dalam mengkomunikasikan misi atau pesan pesan yang mengandung unsur dakwah atau pesan-pesan keagamaan.

¹ Deddy Mulyana. *Ilmu Komunikasi suatu pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya, 2010. Bandung

² A. Markarna, *Komunikasi Dakwah Efektif Dalam Perspektif Alquran*, Jurnal Studia Islamika, Hunafa, Volume. 11, Nomor.1, Juni 2014. Hal: 128

Pesan keagamaan merupakan muatan terpenting dalam kebijakan pemerintahan baik dalam pemerintahan pusat ataupun dalam pemerintahan daerah, sehingga setiap pemangku kebijakan selalu menawarkan bahkan membuat sebuah kebijakan yang nantinya dikemas dengan model serta gayanya masing-masing. Dalam masyarakat yang sangat mapan pesan keagamaan merupakan salah satu kebijakan nasional dalam mengoptimalkan sistem sosial. Tetapi tidak demikian masalah kebijakan keagamaan akan sangat berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang lain.

Kebijakan mengenai pesan keagamaan akan sangat berbeda dengan kebijakan kebijakan lainnya, seperti kebijakan hukum, kebijakan ekonomi dan lain sebagainya, pasalnya kebijakan yang berkaitan tentang keagamaan akan lebih sensitif ketika kebijakan ini dikeluarkan, sehingga tidak jarang suatu kebijakan selalu berujung pada kontroversi dan konflik pada masyarakat, artinya sangat boleh jadi ketika kebijakan itu dikeluarkan akan erat kaitnya dengan perbedaan sudut pandang, maka ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan tentang keagamaan selain isi serta pesan yang disampaikan harus memperhatikan komunikasi yang baik dalam menyampaikan pesan tersebut pada masyarakat, supaya tidak terjadi sebuah kegelisahan yang terus menerus pada masyarakat.

Pesan yang disampaikan oleh pemerintahan maka akan disampaikan menggunakan Komunikasi pemerintahan. Mengkomunikasikan pesan keagamaan melalui pemerintahan merupakan sebuah agenda yang sangat strategis, ketika pesan itu disampaikan melalui pemerintahan maka dengan mudah pesan-pesan pemerintahan dapat disesuaikan atau disinergikan dengan tujuan itu sendiri. Membuat sebuah kebijakan yang sesuai dengan dipastikan

mempunyai epektivitas yang sangat tinggi untuk memebrikan warna terhadap masyarakat.

Menurut Mira perkembangan dakwah saat ini bukan hanya dilakukan diatas mimbar dari mesjid kemesjid dengan dihadiri oleh masyarakat umum, melainkan dakwah pun harus dikemas seefisien mungkin dengan cara yang tepat agar dapat pencerahan yang sangat luas seputar tentang agama.³

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah fasilitator dakwah (*wasilat promosi dakwah*) diharapkan dapat menkomunikasikan pesan-pesan dakwah atau ajaran Islam kepada seluruh lapisan masyarakat. Metode penyampaian pelajaran agama Islam dapat memanfaatkan media yang berbeda-beda. Perkembangan dakwah yang logis saat ini memudahkan penyampaian pesan-pesan dakwah, baik kepada pemerintah maupun secara umum, termasuk model metodologi dakwah yang digunakan untuk menyampaikan berbagai data, termasuk pesan-pesan dakwah.

Pada dasarnya tujuan dakwah adalah untuk menyongsong umat manusia ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia ini dan di akhirat. Pada tataran tunggal, motivasi di balik dakwah adalah asimilasi pelajaran Islam dalam keberadaan seorang Muslim sehingga menjadi kekuatan internal yang dapat menggerakkan individu dalam menyelesaikan pelajaran Islam. Setelah asimilasi pelajaran Islam, diyakini mereka akan memiliki kemauan untuk menerapkan pelajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada tingkat majelis dan daerah setempat, tujuan dakwah adalah untuk memperluas persaudaraan dan solidaritas di antara umat Islam dan non-Muslim serta meningkatkan

³ Fauziyah, Mira. (2006). *Urgensi Media dalam Dakwah*. Yogyakarta: AK Group.

hubungan yang serasi dan saling menghormati antar individu dari majelis atau daerah setempat.⁴

Dalam hal ini komunikasi yang dijalankan oleh pemerintahan memegang peran yang sangat sentral dalam menyampaikan pesannya. seperti yang sudah diketahui bersama bahwa komunikasi pemerintahan pada dasarnya yaitu segala bentuk sesuatu yang berkaitan tentang peraturan serta aksi komunikasi dari pemerintahan, karena komunikasi pemerintahan bukan hanya bagaimana mengelola sebuah opini publik melainkan lebih dari itu, bagaimana pemerintahan dapat mengolah serta memegang keseluruhan proses komunikasi yang berlangsung dipemerintahan untuk mendukung sesuatu, demi tercapainya sebuah pesan yang ingin disampaikan.

Indonesia merupakan negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, artinya masyarakat indonesia mayoritas menganut sebuah kepercayaan kepada masing-masing tuhannya, dalam hal ini masyarakat indonesia masyarakat yang sangat religius dengan sebuah ajaran yang dianutnya. Oleh karena itu tidak sedikit pemerintah membuat sebuah kebijakan yang sipatnya umum lalu kemudian mendumpleng kebijakan-kebijakan keagamaan demi melindungi atau menjadi daya pikat tersendiri oleh masyarakat.

Erlina Hasan mengutarakan bahwa komunikasi pemerintahan yaitu sebuah penyampaian suatu gagasan atau sebuah program pemerintahan kepada masyarakat sebagai upaya mencapai tujuan negara⁵, komunikasi pemerintahan sering juga disebut sebagai istilah komunikasi politik, dalam ungkapannya salah seorang ahli politik, Maswadi Rauf mengutarakan bahwa komunikasi politik yaitu objek kajiannya tentang pesan yang disampaikan

⁴ Basit, Abdul. (2013) *Filsafat Dakwah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁵ Erlina Hasan, *komunikasi Pemerintahan*. PT Repika Aditama, Bandung 2005

dalam komunikasi bercorak politik, yang erat kaitannya dengan sebuah kebijakan kepentingan negara, dan komunikatornya sebagai pelaku politik, kegiatan tersebut bisa secara empirik karena terlihat secara langsung dalam tatanan sosial, adapun komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah merupakan salah satu dari kegiatan dalam sebuah sistem⁶

Komunikasi pemerintahan kepada masyarakat pada dasarnya merupakan penyampaian sebuah ide gagasan atau sebuah pelaturan dari pihak pemerintah kepada masyarakat dalam menempuh sebuah tujuan secara nasional, di era yang serba canggih komunikasi sangat perlu dilakukan, karena hari ini masyarakat mengalami degradasi budaya, dimana hari ini masyarakat tidak mudah terpengaruhi atau mengikuti pelaturan pemerintahan tanpa masyarakat menerima informasi manfaat yang dapat menjadi akselerator bagi kegiatan yang dilaksanakan.

Tujuan komunikasi pemerintah sangat erat kaitannya dengan komunikasi politik, yaitu pesan yang disampaikan oleh komunikator politik, hal ini sejalan dengan tujuan komunikasi. Maka tujuan komunikasi pemerintah adakalanya sekedar menyampaikan sebuah informasi yang bersifat politis, membangun citra politis, membentuk *public opinion* (pendapat umum) atau sangat mungkin jadi tujuan daripada komunikasi politik, untuk menghandel lawan politik, selanjutnya tujuan daripada komunikasi politik yaitu untuk menari simpatik atau sebuah perhatian dari khalayak dalam rangka meningkatkan partisipasi politik pada saat kegiatan pemilu atau pemilihan kepala daerah.⁷

⁶ Harun, Rochjat dan sumarno, 2006, *komunikasi politik sebagai suatu pengantar*, CV. Mandar Majju. Bandung

⁷ Ardial, 2010. *komunikasi Politik*, jakarta, indeks

Beberapa pakar menyebutkan ada beberapa tujuan komunikasi politik yang dibangun, diantaranya menurut Anwar arifin bahwa komunikasi politik dibangun yaitu untuk menciptakan citra politis yang efektif bagi orang banyak, citra politis itu bisa bisa diwujudkan dari sebuah informasi yang kita dengar, bisa informasi secara langsung atau tidak langsung (media elektronik atau media masa yang bekerja untuk meng informasikan pesan-pesan politik serta hangat.⁸

Adapun pendapat yang lain dari Anwar Arifin tentang tujuan komunikasi Politik yaitu membentuk serta membina persepsi umum, dalam membentuk persepsi umum terkait komunikasi politis yang sangat berpengaruh yaitu peran media masa. Meski media masa seperti pres, radio, film televisi, hanya sebagai media menghibur serta memberi pendidikan Juga, media memeberikan sebuah citra politik terhadap umum yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan berpolitik.

Selanjutnya tujuan daripada komunikasi politik yaitu mendorong partisipasi politik artinya orang-orang berperan dalam politik atau partisipasi politik. sehingga dari bagian terpenting pasrtisipasi politik yaitu apabila seseorang atau masyarakat ingin memberikan suaranya untuk seorang politikus atau partai tertrntu dalam pemilihan umum. Berdasarkan tujuan dari komunikasi politik yang sangat erat kaitanya dengan pesan politik yaitu pertama membentuk citra politik, kedua membentuk serta membina pendapat umum, serta mendorong partisipasi umum.⁹

Melihat dari beberapa tujuan dari komunikasi pemerintah atau komunikasi politik pada dasarnya ingin membangun serta menjalin sebuah

⁸ Anwar Arfin, 2006. *Pencitraan dalam Politik (Strategi Pemenangan Pemilu dalam prespektif komunikasi politik*, Pustaka Indonesia

⁹ *Ibid4*

komunikasi yang baik antara pemeritahan pusat dengan masyarakat dengan berbagai sebuah kebijakan yang ada termasuk beberapa kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah, dengan membangun sebuah pola komunikasi yang mendorong serta membina pasrtisipasi umum. Tapi pada faktanya banyak kebijakan pemerintah yang menjadi kontropersi bahkan menjadi memicu terjadinya konflik dimasyarakat terlebih yang berkaitan dengan kebijakan keagamaan.

Sejak menyebarnya informasi yang terjangkit *Covid-19* di dunia, semua kegiatan harus mengikuti kebijakan pemerintah yang diatur oleh protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pihak kesehatan serta pihak pemerintahan, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak serta dibatasinya semua kegiatan sosial, perkumpulan organisasi, pelaksanaan resepsi pernikahan juga dibatasi paratamu undanganya, bahkan dalam kehidupan bergamapun sehari-harinya harus mengikuti intruksi protokol kesehatan yang telah digulirkan kebijanya sama pemerintah pusat, dimana biasanya kegiatan keagamaan dibuka selebar-lebarnya dilaksanakan tanpa sebuah aturan pembatasan seperti saat sekarang. Kegiatan keagamaan pada saat pandemi dibatasi akhirnya kegiatan seperti menyampaikan kegiatan dakwah itu harus dilakukan melalu virtual, dengan menggunakan berbagai media komunikasi, pendidikan keagamaan disekolah akhirnya dilakukan melalui virtual, semstinya kegiatan tersebut dilaksanakan secara *face to face* supaya mendapat pengertian serta pemahaman yang sangat mendalam, memperdalam keilmuan dengan sungguh-sungguh kepada guru. Hari ini pesan kegamaan dapat didapat dengan instan padahal seharusnya untuk mendapat pemahaman itu sangat tentu harus ada beberapa tahapan dalam

mencapainya seperti bertemu langsung dengan guru, sowan agar dapat keberkahan.

Aktivitas keagamaan pada saat pandemi sangat dibatasi tidak seperti biasanya, malah terkesan banyak diatur, pasalnya kebiasaan keagamaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat dimasa pandemi dikurangi, malah bukan hanya dikurangi atau dibatasi justru dilarang, seperti melaksanakan solat berjamaah, mengadakan solat jumaat, solat hari raya Ied, merayakan hari-hari besar islam, solat memakai masker, menjaga jarak pada solat berjamaah. Perayaan hari besar Islam yang diadakan secara virtual atau secara online atau mengeser waktu peringatan sehingga tidak sesuai dengan momentum perayaannya, seperti contoh kegiatan tanggal satu muharam, disegesnya libur nasional memperingati Maulid Nabi Muhamad SAW, padahal kegiatan-kegiatan tersebut disebagian masyarakat dianggap sangat sakral, sehingga pandangan masyarakat akan hal ini sangat mengubah khidmat dalam memperingati ataupun memaknai kegiatan tersebut.

Dimasa pandemi husunya banyak peristiwa atau kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. banyak sekali kegiatan-kegiatan pemerintah yang secara tidak langsung menggait sebuah kebijakan yang selalu mengkaitkan dengan keagamaan. Selain daripada kasus-kasus yang berkaitan dengan keagamaan adanya kebijakan pemerintah tentang dianjurkannya menggunakan vaksin kepada masyarakat, disebagian masyarakat ada yang mengagap menggunakan vaksin tidak boleh, karena berbagai alasan yang terkait dengan bahayanya divaksinasi. Dalam hal ini sama pemerintah harus membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan agama sehingga vaksin itu mempunyai legalitas dari MUI dan hal ini harus dipertimbangkan cara

penyampaiannya agar anjuran menggunakan vaksin pada masyarakat tidak menjadi gaduh. Dan anjuran ini tertuang dalam Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin.¹⁰

Dari beberapa contoh di atas menjadi perbincangan hangat di masyarakat, pasalnya apa yang masyarakat lakukan tidak sesuai dengan apa yang biasa masyarakat lakukan sehingga dengan adanya anjuran demikian dimasyarakat menuai pro dan kontra terhadap pelaturan pemerintah yang sangat menguasai semua sektor lapisan masyarakat, sampai menebus kepada kehidupan keagamaan sehari-hari adanya, kebiasaan baru atau *New Normal* selama ini belum pernah dirasakan oleh masyarakat. Meskipun disajikan dengan era yang baru Agama merupakan yang sangat fundamental bagi setiap pemeluknya, agama sebagai sistem nilai atau sebuah wahyu yang telah terlambang.

Jika mengutip perspektif Asratillah agama membantu manusia dengan implikasi yang tak ada habisnya, agama ada untuk memaknai situasi manusia di tengah alam semesta, agama ada untuk membangun pergaulan antara manusia dan dunia profan dengan sesuatu yang duniawi dan bukan hanya itu, agama ada untuk memicu jaminan manusia untuk menengahi. tangan dalam sejarah.¹¹

Transformasi keagamaan ini menampilkan semangat beragama bagi parapenganutnya, bisa terlihat bagaimana masyarakat menomerduakan serta ketidakpedulian masyarakat kepada kesehatan umat yang lebih luas lagi akan terasa berdampak daripada pelaturan pemerintah bagi umat Islam yang

10

<https://mui.or.id/wp-content/uploads/2021/03/Fatwa-MUI-No-14-Tahun-2021-tentang-Hukum-Penggunaan-Vaksin-Covid-19-Produk-AstraZeneca-compressed.pdf>. (akses 7 februari 2022).

¹¹ David Efendi and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “*Membaca Korona Esai-Esai Tentang Manusia, Wabah, Dan Dunia*” (Gresik Jawa Timur: Caremedia Communication, 2020).

senantiasa menjalani ibadah, sudah sangat pasti membutuhkan respon serta reaksi dari para penganut agama khususnya Islam karena rangkaian ibadah berjamaah melibatakan masa yang cukup besar.¹²

Ungkapan dari berbagai prespektif dari bergai kalangan masyarakat itu pasti bisa terjadi sehingga banyak masyarakat yang mengambil sebuah sikap yang kadang bertentangan dengan peraturan pemerintah yang sudah terus menerus menyampaikan tetap mengikuti protokol kesehatan, dimanapun leading sectronya termasuk leading sektor keagamaan, kebiasaan barupun diterbitkan terkait tatakelola atau aturan pemerintah melalui MUI untuk memperkuat kebijakan pemerintah tentang mematuhi protokol kesehatan. Seharusnya kaum religius sudah selayaknya menjadikan agama sebagai sebagai penentu arah kehidupnya dimasa pandemi, agama justru sangat mempunyai peran penting dalam karena agama menjadi media sandaran bagi setiap pemeluknya dalam menyikapi persoalan hidup seperti pada masa pandemi ini yang kondisinya pada saat ini sangat menghawatirkan.

Upaya untuk mengatasi kekhawatiran ini Endang Turmudi mengatakan “sejarah umat Islam wabah virus pernah terjadi dan bisa dihindari melalui ilmu pengetahuan serta melakukan beberapa hal seperti harus tenang, tidak takut. Turmudi menyebutkan *Covid-19* dalam prespektif umat Islam bisa dilihat sebagai musibah atau azab.¹³ Bagi mereka yang mempunyai keyakinan yang sangat kuat bahwa rumah ibadah yaitu salah satunya tempat untuk bermunajat meminta kepada tuhan agar terhindar dari paparan *covid-19*, bukan malah menjadi klaster baru sehingga anjuran pemerintah sering bertabrakan

¹² Abdullah, “Mendialogkan Nalar Agama Dan Sains Modern Di Tengah Pandemi Covid-19.”

¹³ Ranny Rastati, “Peran Agama Dalam Memutus Mata Rantai COVID-19 - Pusat Penelitian Masyarakat Dan Budaya - LIPI,” Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia , May 22, 2020, <https://pmb.lipi.go.id/peran-agama-dalam-memutus-mata-rantai-covid-19/?amp> diakses pada Jum’at, 08 Oktober 2021.%5C.

dengan pelaksanaan ibadah, hal ini sudah terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia mereka beralasan yang terppar.

Praktek ibadah dalam keagamaan misalnya solat harus membawa safety yaitu masker dan menjaga jarak, merupakan hal yang baru kebiasaan baru dimasa wabah virus, setrategi komunikasi kesehatan publik dalam proses mencegah, melacak serta mengahabat penyebaran *covid*, ditengah terjadi perselisihan tentang mehami pandemi dalam hal ibadah ada juga beberapa organisasi keagamaan justru memang terus mengawal serta mendukung terhadap kebijakan pemerintah yang digulirkan hari ini, diantaranya NU Nahdotul Ulama, Muhamadiyah dan MUI Majelis Ulama Indonesia lembaga atau organisasi Islam ini secara rutin mengeluarkan berbagai himbauan soal *Covid-19* serta ikhtiar penanggulangnya sesuai syariat islam¹⁴

Kebijakan pemerintah sangat penting untuk dikeluarkan termasuk kebijakan keagamaan, pada masa *covid-19* pemerintah membuat sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat samapai kebijakan-kebijakan ini masuk kepada lidng sektor pemerintahan daerah diantaranya kecamatan-kecamatan serta desa-Desa yang ada dipelosok tentunya.

Disetiap kecamatan dimasing-masing daerah pasti menumpuk sebuah kebijakan yang bersumber dari pemerintah pusat yang harus diterapkan kepada masyarakat luas dan itu tidak mudah dalam menyapaikan sebuah kebijakan pada masyarakat. Kecamatan dan Desa merupakan ujung tombak kaki tangan pemerintah yang langsung bisa bersentuhan dengan masyarakat.

¹⁴ Didik Haryadi Santoso and Awan Santosa, *Covid-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif* (Yogyakarta: MB ridge Press, 2020).

Oleh karena Desa merupakan ujung tombak dari pemerintah pusat ketika menyampaikan sebuah pesan keagamaan tentu diperlukan proses komunikasi yang baik untuk menyampaikan pesan keagamaan agar kebijakan itu mudah diterima serta tidak menuai pro kontra dimasyarakat. Karena banyak kecamatan-kecamatan atau Desa yang kebijakannya ditentang oleh masyarakat sehingga terjadi konflik antara petugas pemerintahan dengan masyarakat, hal ini tentu bukan kebijakannya yang tidak baik, melainkan sebuah proses komunikasi yang belum tepat mengenai sasaran pada masyarakat.

Di kecamatan Mande, banyak sekali dinamika dimasyarakat yang sangat tentu menuai pro kontra akibat diterapkannya sebuah kebijakan terkait dengan kegiatan keagamaan, termasuk ada yang melaksanakan ada juga tidak, salah satu contoh adanya kegiatan solat ied di masjid jami, kegiatan solat jum'at yang masih dilaksanakan atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya, sangat boleh jadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentu sudah digodog dan dipertimbangan secara matang ditingkat teratas, tapi pada kenyataannya yang terjadi dilingkungan kecamatan mande banyak kebijakan yang ditentang oleh masyarakat terkait kebijakan itu salahsatunya yaitu warga-warga yang ada di daerah-daerah.

Salah satu contoh pada saat kegiatan ramadahan, ketika memeriahkan malam Nujulul Qur'an diperumahan Rantau Indah Desa bobojong misalnya terjadi pembubaran secara paksa oleh Tim Satgas dengan alasan untuk tidak mengadakan kerumunan, hal ini sontak semua masyarakat terpancing untuk memberikan sebuah perlawanan terhadap para petugas yang datang untuk menertibkan kerumunan sehingga terjadi adu argumentasi yang alot dan

memanas. Kata bapak yandi sebagai wakil DKM ketika dimintai keterangan dia mengatakan

“Hal ini jadi lucu saja bagi saya. Masalahnya di Mall, di pasar, terminal, di pasar minggu setiap minggu ada bazar tidak pernah tuh lihat ada pembubaran kerumunan, tapi masjid berjamaah dibatasi pengajian diliburkan, tadarus di rumah masing masing, sekalinya memperingati malam Nujul Qur’an dibubarkan, kan aneh, ujarnya”¹⁵

Contoh kasus berikutnya ketika pemerintah melarang pelaksanaan solat Ied di masjid kaum yang ada di Desa sukamantri dimasa pademi, hal ini menuai keritikan keras dari elemen lapisan masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, pasalnya warga mempunyai pemahaman kuat tentang rumah ibadah, jangan samapai negri ini sakit tapi malah menjauh dari rumah ibadah. Buntut dari penolakan ini terjadi unjukrasa dari warga masyarakat. Warga berbondong-bondong mendatangi kantor Desa untuk menyuarakan bentuk ketidak setujuan terhadap pelaturan pemerintah yang dikeluarkan terhusus yang berkaitan dengan keagamaan.

Berbeda dengan Desa kademangan, meski secara kultur masyoritas masyarakat yang ada di Desa Kademangan merupakan mayoritas terbanyak pesantren dan para santri dan kiyai, tetapi kebijakan itu bisa diterima meski dalam pelaksanaanya ada sedikit dinamika, tetapi tidak seperti di beberapa Desa tetangga yang benar benar terjadi penolakan secara kuat dari masyarakat sekitar.

Maka berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan diatas terkait masalah kebijakan pemerintah yang mudah diterima di Desa kademangan yang menarik untuk diteliti, dalam hal ini bukan masalah kebijakan yang ingin diteliti melainkan sebuah komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan

¹⁵ wawancara pada bulan oktober 2021

kebijakan-kebijakan pesan keagamaan dalam mensosialisasikan agar diterima dimasyarakat.

Maka atas dasar alasan tersebut tertarik untuk menganalisis lebih jauh serta mendalami hal tersebut dengan judul “Komunikasi Pemerintahan Dalam Menyampaikan Pesan keagamaan (Studi Deskriptif di Desa Kademangan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur ”

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diawal, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut;

- 1.2.1 Bagaimana pesan pemerintahan terkait kebijakan keagamaan dimasa pandemi.?
- 1.2.2 Bagaimana proses pemerintahan Desa mengkomunikasikan Pesan keagamaan.?
- 1.2.3 Bagaimana hasil komunikasi pemerintahan Desa dalam menyampaikan pesan keagamaan .?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan kepada fokus penelitian diatas, peniltian ini bertukujuan mengkaji secara objektif tentang.

- 1.3.1 Pesan pemerintahan terkait kebijakan keagamaan dimasa pandemi ?
- 1.3.2 Peroses Pemerintahan Desa mengkomunikasikan pesan keagamaan.
- 1.3.3 Hasil komunikasi pemerintahan Desa dalam menyampaikan pesan keagamaan?

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini akan sangat memberikan manfaat apabila mempunyai kegunaan dua sisi pertama kegunaan secara akademis, kedua

kegunaan secara praktis. Adapaun kegunaan yang sangat diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1.4.1 Kegunaan Secara akademis

Secara keilmuan penulisan karya ilmiah ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan kepada para pembaca ataupun kelembagaan prodi komunikasi Penyiaran Islam, diantaranya dakwah atau komunikasi melalui lembaga pemerintahan, serta diharapkan dapat menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan dan mengimplementasikan dalam ilmu dakwah dikalangan pemerinthan.

1.4.2 Kegunaan Secara Praktis

Secra peraktis diharapkan sangat bermanfaat bagi penulis yang lain serta lemaga pemerintahan Desa Kademangan Kecamatan Mande dalam mengkomunikasikan pesan keagamaan, kemudia bisa dijadikan sebuah referensi bagi semua kalangan dalam mengkomunikasikan sebuah kebijakan keagamaan dikalangan masyarakat. Dan, lembaga pemerintahan hususnya Desa kademangan kec. Mande kab. Cianjur.

1.5. Landasan Pemikiran

Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya mencoba untuk menggali lebih dalam serta menggambarkan lebih luas tentang Komunikasi Pemerintahan Dalam Menyampaikan Pesan Keagamaan, mengacu pada konsep serta pertanyaan yang diajukan peneliti, yaitu berfokus pada fokus penelitian *Pertama*, Bagaimana pesan pemerintahan terkait kebijakan keagamaan dimasa pandemi. *Kedua*, Bagaimana proses pemerintahan Desa mengkomunikasikan Pesan keagamaan. *Ketiga*, Bagaimana hasil komunikasi pemerintahan Desa dalam menyampaikan pesan keagamaan.

Berdasarkan fokus penelitian maka landasan pemikiran akan menguraikan dan memaparkan secara refersebtatif tentang konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, pada tataran praktisnya akan landasan oprasional dalam penelitian yang dilaukan peneliti. Landasan oprasional tersebut menjadi semacam *guidline* dari penelitian ini, sehingga alur penelitian bisa tergambar dan terlihat secara jelas.

1.6.1 Komunikasi

Secara etimologis komunikasi atau dalam bahasa Inggris '*communication*' berasal dari bahasa latin '*communicatio*', bersumber dari *communis*' yang berarti "sama". Komunikasi minimal harus mengandung "kesamaan makna" antara kedua belah pihak yang terlibat. Dikatakan minimal karena kegiatan komunikasi itu tidak bersifat informatif saja, yakni agar orang mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang bersedia menerima sesuatu paham atau keyakinan, melakukan suatu kegiatan dan lain-lain. ¹⁶

Secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian itu diambil kesimpulan bahwa komunikasi melibatkan sejumlah, di mana seseorang menyatakan sesesuatu kepada orang lain. ¹⁷

Didalam komunikasi dibutuhkan sebuah cara yang baik untuk mendukung serta menompang komunikasi supaya lebih baik serta sesuai dengan sasaran. Model dalam komunikasi dapa dipahami sebagai representasi dalam suatu fenomena, baik nyata maupun tidak

¹⁶ Ilaihi, *Wahyu, Komunikasi Dakwah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 20102010. Hal 4

¹⁷ Effendi, Onong *Uchjana, Dinamika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.Effendi, 2008.hal 4

nyata dengan menojolkan bagian-bagian terpenting dalam penomena tersebut, sebagai suatu perupaman yang sistemik sebagai sebuah model, untuk menunjukkan berbagai aspek dari berbagai proses.

Model komunikasi adalah model untuk memahami atau untuk membuatnya lebih sederhana untuk memahami komunikasi, dalam pandangannya Sereno dan Mortensen mengatakan model komunikasi adalah gambaran ideal tentang apa yang diperlukan untuk komunikasi terjadi, akibatnya model dapat digambarkan sebagai kasual untuk memahami atau mengeksekusi dan bekerja pada teori, kemampuan komunikasi pada dasarnya dapat menggambarkan siklus komunikasi, menunjukkan hubungan secara lahiriah dan membantu serta menemukan dan memperbaiki suatu kendala komunikasi dalam prespektif teoritik¹⁸

Aubrey Fisher, berpendapat bahwa model adalah hubungan yang memodifikasi karya dan memilih bagian dari keseluruhan, komponen, properti atau bagian utama dari kekhasan yang digunakan sebagai model, model dapat dianggap sebagai penggambaran kasual agar masuk akal. dari atau menerapkan teori, atau secara keseluruhan model adalah peningkatan teori yang disederhanakan. ¹⁹

Seperti yang ditunjukkan oleh Gardon Wiseman dan Larry Bread cook ada tiga elemen model korespondensi, khususnya yang menggambarkan kekhasan siklus komunikasi, mengoordinasikan koneksi hubungan visual, membantu menemukan dan memperbaiki kemacetan korespondensi, menurut Waener J.Sevren dan James w.

¹⁸ Mulyadi, Deddy, *Ilmu Komunikasi suatu pengantar*. (Bandung, Rosdakarya, 2001), Hal 121

¹⁹ Mulyadi Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. (Bandung Remaja Rosda Karya, 2007)

Mug, Jr. Model membantu merencanakan teori dan menyelesaikan suatu hubungan, karena hubungan antara model dan teori sangat dekat, model sering dikaitkan dengan teori, oleh karena itu kami memilih komponen-komponen tertentu yang dimasukkan dalam model, suatu model mengimplikasikan penilaian atas relevansi, dan ini pada gilirannya mengimplikasikan suatu teori mengenai fenomena yang diteorikan. Model dapat berfungsi sebagai suatu basis bagi suatu teori yang lebih kompleks, yaitu alat untuk menjelaskan teori dan menyarankan cara-cara memperbaiki konsep.²⁰

1.6.2 Pemerintahan

Istilah pemerintah berasal dari kata permintaan, sesuai dengan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia permintaan mengandung makna kata yang bertujuan meminta sesuatu untuk diselesaikan, pemerintah adalah orang perseorangan, organisasi atau perangkat yang mengeluarkan atau memberikan permintaan.²¹

Sedang menurut Erliana Hasan menyebutkan²² bahwa komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bernegara.²³ Komunikasi politik adalah objek konsentrasi dalam teori politik mengingat fakta bahwa pesan yang dikomunikasikan dalam siklus komunikasi digambarkan oleh masalah legislatif, khususnya yang terkait dengan kekuatan politik negara, pemerintah, dan lebih jauh lagi latihan para komunikator dalam tempat sebagai penghibur

²⁰ Mulyan deddy, *Ilmu komunikasi Suatu Pengantar*. (Bandung: Rosdakarya, 2001), Hal 123

²² Talizuduhu Ndraha, *Metodelogi Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta; Bina Aksara, 1988) hal. 23

²³ Hasan,Erlina. *Komunikasi pemerintahan*. Bandung Rafika aditama. 2005. hal

politik. Komunikasi politik dilihat dari dua aspek, yaitu latihan politik sebagai latihan politik dan latihan logika. Komunikasi sebagai tindakan politik adalah penyampaian pesan-pesan dengan kualitas politik oleh penghibur politik keberbagai pertemuan. Latihan-latihan ini bersifat eksperimental karena dilakukan secara nyata dalam kegiatan publik. Sementara itu, komunikasi politik sebagai gerakan logis menganggap korespondensi politik sebagai salah satu latihan politik dalam kerangka politik.²⁴

Pemerintah membuka ruang komunikasi sangat boleh jadi mempunyai misi serta tujuan tertentu, menurut Ardial Motivasi di balik komunikasi politik terkait erat dengan pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik. Sesuai dengan motivasi komunikasi, alasan komunikasi politik kadang-kadang hanya penyampaian data politik, pembentukan gambaran politik, penyusunan penilaian umum (*general assessment*) dan juga dapat menangani sentimen atau tuduhan lawan politik. Selain itu, komunikasi politik berencana untuk menarik kerumunan yang bijaksana untuk meningkatkan kerja sama politik sambil bergerak menuju keputusan umum atau pemilihan kepala teritorial.²⁵

1.6.3 Komunikasi Pemerintahan

Sedangkan Komunikasi Pemerintahan pada hakekatnya merupakan proses penyebaran dan pertukaran informasi di dalam dan dengan luar organisasi. Melalui komunikasi pemerintahan, maka eksekutif pemerintahan bertukar dan membagi informasi dengan yang

²⁴ Harun, Sumarno. *Komunikasi politik sebagai Suatu Pengantar*. Bandung Mandar Maju, 2006. Hal

²⁵ Ardial. *Komunikasi Politik*, 2010 Jakarta, indeks, hal 44

lain, yaitu dengan legislatif, dengan staf, dengan pelaku bisnis, dan dengan masyarakat. Melalui komunikasi, eksekutif pemerintah atau administrator atau manajer pemerintah bermaksud untuk mempengaruhi sikap (*Attitude*), pemahaman (*Understanding*), dan perilaku (*Behavior*) birokrasi dan masyarakat. Dengan demikian, tiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis merupakan bagian dari proses komunikasi pemerintahan, baik sebagai sender di satu waktu, dan di waktu lain ia menjadi *receiver*.²⁶

1.6.4 Pesan Keagamaan

Pesan adalah suatu pemikiran, pemikiran, data dan penilaian yang dilontarkan oleh seorang komunikator kepada komunikan yang bertujuan mempengaruhi komunikan menuju sikap ideal oleh komunikator.²⁷

Pesan keagamaan bisa juga dikatakan dakwah, atau pesan yang disampaikan oleh seorang dai kepada seorang mad'u yang didalamnya tersimpan muatan pesan-pesan keagamaan. Secara terminologi dapat didefinisikan sebagai usaha para ulama serta orang-orang yang mempunyai kemampuan ilmu agama Islam untuk disampaikan kepada halyak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang urusan dunia dan akhirat.²⁸

Sedangkan menurut Jalaludin Rahamat dakwah merupakan ilmu yang membahas proses penerimaan, pengolahan, serta penyampaian pesan ajaran Islam untuk merubah tingkah perilaku

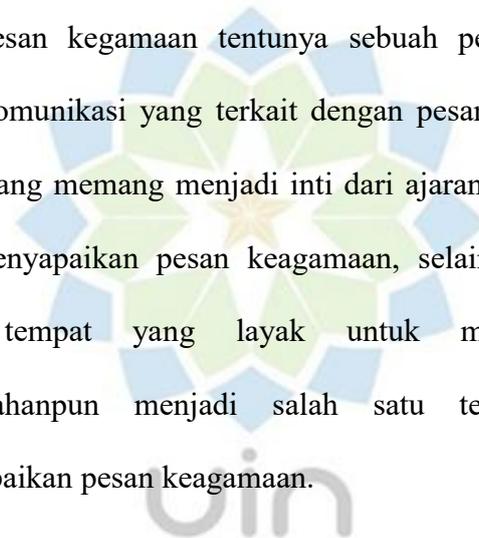
²⁶ Ulber Silalahi, *Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik* Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 1, 2004

²⁷ Susanto, astrid. *Komunikasi teori dan praktek*. (Bandung. Bina Cipta 1997. Hal.7.

²⁸ Moh ali Aziz, *Edisi Revisi, Ilmu Dakwah*, Jakarta. 2004 hal.11

individu, kelompok atau khalyak sesuai dengan ajaran islam.²⁹ Adapun menurut Arifin dakwah adalah suatu kegiatan ajakan dalam bentuk lisan, tingkah laku, tulisan atau sebagainya, yang dilakukan secara saadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok, agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, serta penghayatan terhadap ajaran agama, *massage* yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur-unsur paksaan.³⁰

Pesan keagamaan tentunya sebuah pesan yang disampaikan melalui komunikasi yang terkait dengan pesan-pesan Aqidah, ibadah, syariah yang memang menjadi inti dari ajaran islam, ada banyak cara untuk menyampaikan pesan keagamaan, selain di majlis taklim dan tempat tempat yang layak untuk mencari ilmu agama, pemerintahanpun menjadi salah satu tempat strategis untuk menyampaikan pesan keagamaan.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁹ Enjang & aliyudin, Dasar-Dasar Ilmu Dwakwah. Bandung widiya Padjajaran. 2009.hal 20

³⁰ Munir & Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah . Jakarta. Kencana 2009. Hal.20.